

PROSPEK MIGRASI KE KOTA-KOTA MENENGAH DAN KECIL

Studi Kasus Tasikmalaya

Oleh Hastu Prabatmodjo

Desentralisasi dan otonomi yang lebih besar kepada daerah-daerah, diperkirakan akan semakin memperkuat fungsi dan peranan kota-kota menengah dan kecil, termasuk dalam proses migrasi. Dari hasil penelitian di Kabupaten Tasikmalaya disimpulkan bahwa kota-kota menengah cukup berarti sebagai tujuan migrasi yang berasal dari dalam kabupaten. Disamping itu juga terdapat petunjuk bahwa kota-kota tersebut sudah berfungsi dengan baik sebagai ruang kehidupan. Hal ini nampaknya mempengaruhi orang untuk bermigrasi keluar, lebih jauh lagi investasi untuk memperluas kesempatan ekonomi yang lebih besar ke kota-kota tersebut, nampaknya memiliki peluang untuk membiaskan arah migrasi yang selama ini banyak menuju kota-kota besar.

Pendahuluan

Issu desentralisasi dan otonomi yang cukup bergema beberapa waktu terakhir diperkirakan akan semakin dirasakan sebagai suatu kebutuhan pada masa-masa yang akan datang sejalan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan di daerah dalam menyelenggarakan pembangunan. Dalam kaitan ini, pengembangan kota-kota menengah dan kecil dapat menjadi salah satu isu strategis karena di kota-kota itulah kegiatan-kegiatan lokal akan bertumpu. Isu-isu yang saling bertautan tersebut pada dasarnya digerakkan oleh keinginan untuk menciptakan keterkaitan yang memungkinkan proses pertukaran yang lebih efisien serta distribusi pelayanan dan perkembangan yang lebih merata secara spasial (lihat misalnya Rondinelli and Rudle, 1978, ch.2-3; Rondinelli, 1983; UNCRD, 1985).

Pergerakan penduduk pada hakikatnya dapat dipandang sebagai suatu tanggapan terhadap perubahan-perubahan struktural secara luas yang berlangsung pada suatu masyarakat. Berdasarkan perspektif ini, penjelasan tentang pergerakan penduduk perlu dicari dalam proses-proses yang membentuk ketidakmerataan kesempatan secara spasial. Lebih jauh, wilayah-wilayah

(maupun kota-kota, pen.) yang paling menarik investasi pemerintah maupun swasta dan paling terintegrasi dengan ekonomi dunia adalah wilayah dengan migrasi masuk yang dominan (Hugo, *et al.*, 1987: 225-226). Dengan melihat pola sebaran investasi dan arus tukar-menukar yang terjadi selama ini, dapat diperkirakan bahwa Jakarta serta beberapa ibukota propinsi lainnya adalah sasaran migrasi masuk yang utama bagi penduduk wilayah belakang.

Kembali kepada isu desentralisasi, sangat menarik untuk mengetahui apakah itu juga akan disertai oleh perubahan-perubahan pola pergerakan penduduk. Kebanyakan kota-kota menengah dan kecil dengan kekecualian kota-kota dengan fungsi-fungsi khusus memiliki migrasi bersih yang terbatas dibandingkan dengan kota-kota metropolitan (lihat Hugo *et al.*, 1987: 200). Desentralisasi dan otonomi diharapkan akan mengubah sebaran pola investasi maupun kesempatan-kesempatan secara spasial yang pada gilirannya akan mempengaruhi pola-pola pergerakan penduduk. Perubahan pola pergerakan sendiri dapat menjadi petunjuk berlangsungnya pemerataan spasial yang lebih besar.

Tulisan ini dimaksudkan untuk menajagi prospek-prospek perubahan pola pergerakan penduduk

• **Hastu Prabatmodjo**, Staf pengajar di Jurusan Teknik Planologi ITB yang memiliki latar belakang keahlian pertanian dan kependudukan. Sekarang memusatkan perhatian pada relasi-relasi timbal balik antara manusia dengan lingkungannya pada berbagai lingkup ruang.

melalui pengkajian situasi dan peranan yang sekarang disandang oleh kota-kota menengah dan kecil. Sebagai kasus adalah Kota Tasikmalaya, Singaparna dan Ciawi di Kabupaten Tasikmalaya, dengan memanfaatkan data hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Perencanaan Wilayah dan Kota ITB pada awal tahun 1991. Dimana pembahasan akan mencakup tiga hal, yaitu: gambaran kontekstual kota-kota yang diteliti, pola dan arah migrasi di kota-kota yang diteliti dan beberapa kesimpulan tentang prospek migrasi ke kota-kota tersebut.

Pengenalan Kontekstual

Menurut analisis NUDS (LPP, 1985), Kota Tasikmalaya termasuk ke dalam simpul I di Jawa Barat di samping Kota-kota: Bandung, Cimahi, Bogor dan Cirebon. Dengan demikian, kota tersebut memiliki kedudukan yang amat strategis dalam koleksi dan distribusi barang dan jasa terutama di Jawa Barat bagian Tenggara. Posisi ini amat mendukung kedudukan tertinggi yang dicapai Tasikmalaya dalam hirarki kota-kota di Priangan Timur. Penelaahan lebih jauh terhadap Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa meskipun berada di jalur yang strategis, fungsinya sebagai pusat perhubungan dan komunikasi dinilai masih kurang lengkap (LPP, 1991: 31). Apakah semua itu mempengaruhi pola-pola migrasi dari/ke Kota Tasikmalaya adalah suatu pertanyaan yang menarik.

Dalam konteks Kabupaten Tasikmalaya, Singaparna berada pada orde ke-2. Fungsi dan pelayanan Singaparna sebagai pusat kecamatan dinilai cukup lengkap. Dimana peran penting kota ini adalah sebagai pusat koleksi dan distribusi untuk wilayah Tasikmalaya bagian Selatan/Barat, selain itu terdapat pula kegiatan industri di kota ini. Ada sekitar 6 wilayah kecamatan lain yang tergantung kepada pelayanan Singaparna.

Meskipun Ciawi juga berada pada orde ke-2 dalam konteks Kabupaten Tasikmalaya, skala pelayanan kota ini masih di bawah Singaparna. Terdapat 2 wilayah kecamatan lain yang dilayani oleh kota ini. Posisinya yang berada di jalur transportasi regional Tasikmalaya-Bandung amat mendukung perkembangan kota ini. Di lain pihak, keterbatasan wilayah belakang dan relatif dekat dengan Kota Tasikmalaya menyebabkan terbatasnya berkembangnya fungsi pelayanan kota ini (LPP, 1991: 31-33).

Pola dan Arah Migrasi

Registrasi penduduk antara tahun 1986-1990 Kotif Tasikmalaya menunjukkan migrasi bersih yang negatif. Data kecamatan Singaparna dan Ciawi (termasuk wilayah

pedesaan) menunjukkan hal yang serupa. Meskipun data registrasi sering dikritik sebagai tidak akurat dan berpeluang besar untuk mengalami 'under-cover', paling tidak ini dapat menjadi petunjuk tentang arah-arrah migrasi di wilayah Tasikmalaya. Secara tradisional, wilayah tersebut banyak menghasilkan migrasi ke luar bukan hanya ke Jakarta/Bandung, tetapi juga ke tempat-tempat lain. Tingkat aksesibilitas yang cukup tinggi dengan Jakarta dan Bandung juga memungkinkan penduduk Tasikmalaya untuk bersirkulasi ke dua kota tersebut.

Hasil penelitian lapang menunjukkan bahwa separuh lebih responden (mewakili rumah tangga) di Tasikmalaya dilahirkan di luar desa tempat tinggal sekarang. Terlihat bahwa kejadian '*life-time migration*' di kota tersebut cukup berarti. Proporsi responden yang lahir di dalam desa (bukan migran) di Singaparna dan Ciawi lebih tinggi dibandingkan dengan di Tasikmalaya. Dengan melihat fungsi dan peranan Kota Tasikmalaya yang lebih luas lingkupnya, hal yang semacam itu bukan merupakan sesuatu yang mengejutkan (Tabel 1). Diakui bahwa ini tidaklah merupakan gambaran dari seluruh peristiwa migrasi.

Tempat kelahiran responden juga memberikan informasi tentang lingkup pengaruh kota-kota tersebut dalam peristiwa migrasi masuk. Bagian terbesar dari para pendatang tersebut berasal dari Kabupaten Tasikmalaya sendiri atau dengan perkataan lain, peristiwa migrasi yang terjadi sebagian besar merupakan intra-kabupaten. Ini termasuk mereka yang pindah dari satu lokasi ke lokasi lain di kota yang sama. Proporsi pendatang yang berasal dari dalam Kabupaten Tasikmalaya sendiri di Kota Tasikmalaya lebih tinggi daripada di Singaparna. Kota Ciawi menunjukkan kekhususan untuk hal yang sama angkanya tidak berbeda banyak dengan Tasikmalaya. Dengan kekecualian Ciawi, nampaknya kedudukan kota-kota tersebut cukup berarti dalam menarik migran intra-kabupaten. Untuk migrasi inter-kabupaten, secara konsisten nampak bahwa kota-kota yang lebih tinggi kedudukannya herpeluang lebih besar untuk menarik migran.

Tabel 1
Responden Berdasarkan Tempat Kelahiran

Tempat Kelahiran	Tasikmalaya	Singaparna	Ciawi	Ke-3 Kota
	(%)			
A	41,9	60,0	48,6	49,0 (103)
B	35,2	21,4	37,1	31,0 (65)
C	19,0	15,7	11,4	16,7 (35)
D	3,8	2,9	2,9	3,3 (7)
B+C+D	58,1	40,0	40,0	51,0 (107)
Total	100,0 (105)	100,0 (70)	100,0 (70)	100,0 210

Sumber: Penelitian Lapang

Alasan-alasan responden pendatang untuk bertempat tinggal di lokasi tempat tinggal sekarang menunjukkan masih dominannya alasan-alasan yang berkaitan dengan keluarga (ikut orangtua/ famili/pasangan hidup). Seperti yang sudah diperkirakan, Kota Tasikmalaya dengan fungsi koleksi dan distribusi yang lebih tinggi hirarkinya mampu memberikan kesempatan-kesempatan ekonomi yang lebih luas dibandingkan dengan dua kota lainnya. Ini tercermin melalui besarnya proporsi responden yang menyatakan tinggal di Tasikmalaya karena bekerja. Sebaliknya, keterbatasan Ciawi dalam memberikan kesempatan ekonomi terlihat dari kecilnya proporsi responden yang menyatakan tinggal di kota tersebut karena bekerja (Tabel 2).

Tabel 2.
Alasan Menetap di Kota Tempat Tinggal Sekarang

Alasan Menetap	Tasikmalaya	Singaparna	Ciawi	Ke-3 Kota
	(%)			
• Ikut Keluarga/ Pasangan Hidup	5,41	30,1	61,1	54,3 (58)
• Bekerja	42,6	32,1	5,6	33,6 (36)
• Bersekolah	0,0	7,1	0,0	1,9 (2)
• Lainnya	3,3	7,1	33,3	9,3 (10)
• Tidak Menjawab	0,0	3,6	0,0	0,9 (1)
Total	100,0 (61)	100,0 (28)	100,0 (18)	100,0 (107)

Sumber: Penelitian Lapangan

Migrasi yang terjadi di kota-kota yang diteliti bukan hanya berupa migrasi masuk saja. Kota-kota tersebut sekaligus juga dicurigai sebagai sumber migran ke kota-kota/lokasi lain. Data registrasi penduduk cukup mengisyaratkan hal ini. Untuk mengungkapkan masalah tersebut lebih jauh, akan dikaji 'potensi' kota-kota tersebut untuk menghasilkan migrasi ke luar. Dalam kajian tersebut tidak dilakukan pengukuran secara langsung berupa banyaknya orang yang ke luar dari ke tiga kota yang diteliti, tetapi secara tidak langsung dengan menajagi keinginan ke luar dari kota-kota yang diteliti.

Terdapat asosiasi negatif antara tingkat kepuasan terhadap kondisi umum di tiga kota yang diteliti (Tasikmalaya, Singaparna dan Ciawi) dengan keinginan pindah. Responden yang merasa tidak puas dengan kota tempat tinggalnya sekarang cenderung ingin pindah dan sebaliknya (Tabel 3). Meskipun 'keinginan' sendiri masih menempuh proses yang panjang untuk sampai pada 'tindakan' yang menghasilkan peristiwa migrasi, paling tidak ini sudah mengisyaratkan adanya potensi migrasi keluar dari kota-kota tersebut. Namun dalam kaitan ini perlu dicatat bahwa sebagian besar responden (lebih dari

75 %) menyatakan puas dengan keadaan lalu lintas, keamanan, kebersihan dan pelayanan aparat di ketiga kota yang diteliti. Boleh jadi kondisi aktualnya berbeda dengan standar-standar ideal, tetapi paling tidak kota-kota tersebut sudah mengindikasikan berfungsi dengan baik sebagai ruang kehidupan.

Tabel 3
Potensi Migrasi Ke Luar dari Kota-kota yang Diteliti

Peubah	Persepsi Terhadap Situasi Umum Kota			Seluruh Kategori
	Puas	Tidak Puas	Tidak Tahu	
	(%)			
Ingin Pindah	14,0	58,3	60,0	17,6 (37)
Tidak Ingin Pindah	79,8	33,4	40,0	76,2 (160)
Tidak Tahu	6,2	8,3	0,0	6,2 (13)
Total	100,0 (193)	100,0 (12)	100,0 (5)	100,0 (210)

Sumber: Penelitian Lapangan

Amat menarik untuk mengetahui kota-kota mana yang diinginkan sebagai tujuan kepindahan bagi sebagian responden yang ingin pindah tersebut. Dari Tabel 4 nampak bahwa Bandung adalah merupakan kota yang paling diinginkan, sedangkan kota-kota lain cukup merata perolehan peminatnya. Cukup besarnya perolehan kota-kota di luar Jawa Barat menunjukkan keterbukaan wawasan responden terutama di Kota Tasikmalaya dan Singaparna. Diperkirakan bahwa keinginan tersebut dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan yang mungkin tidak keseluruhannya rasional. Melalui informasi ini dapat dijangaji potensi arah-arrah migrasi, meskipun masih boleh dianggap sebagai gambaran yang masih bersifat 'buram'.

Tabel 4
Kota-kota Yang Diinginkan Sebagai Tujuan Kepindahan Asal Tasikmalaya Singaparna Ciawi Ke tiga Tujuan Kota

Tujuan	Asal	Tasikmalaya	Singaparna	Ciawi	Ke-3 Kota
		(%)			
Kotif Tasikmalaya		0,0	12,5	0,0	5,4 (2)
Bandung		53,3	18,8	16,7	35,2 (13)
Jakarta		13,3	18,7	0,0	13,5 (5)
Kota lain di Jabar		13,3	18,7	16,7	16,2 (6)
Kota di luar Jabar		20,1	25,0	0,0	16,2 (6)
Tidak Tahu		0,0	6,3	66,6	13,5 (5)
Total		100,0 (15)	100,0 (16)	100,0 (6)	100,0 (37)

Sumber: Penelitian Lapangan

Prospek Migrasi ke Kota-Kota Menengah dan Kecil

Dari hasil penelitian di Tasikmalaya tersebut, ada dua hal yang dapat diangkat sebagai pelajaran, yaitu:

Pertama, kota menengah semacam Tasikmalaya ternyata cukup berperan sebagai tujuan migran yang bermaksud mencari kesempatan-kesempatan ekonomi, terutama migran dari wilayah Kabupaten Tasikmalaya sendiri. Ini mengisyaratkan bahwa kalau kesempatan ekonomi yang lebih luas diciptakan di kota-kota semacam itu dengan investasi yang memadai, ada peluang untuk membiaskan migrasi (maupun sirkulasi) lebih banyak ke kota-kota menengah dan tidak hanya menuju ke kota-kota besar saja. Peningkatan kapasitas ekonomi kota-kota menengah memerlukan dukungan segi-segi kemampuan manajemen, peraturan dan kelembagaan, termasuk yang mengatur pembagian tanggungjawab (sekaligus alokasi sumberdaya, pen.) antara pemerintah pusat dan pemerintah kota (lihat Firman, 1991). Untuk jangka waktu yang lama, wilayah pedesaan masih merupakan sumber migran yang utama dengan terus berlangsungnya perbaikan teknologi budidaya pertanian dan penambahan penduduk pedesaan.

Dalam kaitan ini, migrasi tidak dipandang sebagai tujuan melainkan sebagai sarana untuk mencapai pemerataan perkembangan spasial yang lebih memenuhi rasa keadilan.

Kedua, selain peningkatan kapasitas ekonomi, kota-kota menengah dan kecil juga memerlukan pengembangan fungsi pelayanan agar mampu menciptakan kemudahan

dan kenyamanan bagi penduduknya. Ini semua diperlukan agar penduduk kota-kota tersebut berkurang keinginannya untuk pindah ke kota-kota lain yang dipandang lebih memenuhi kebutuhannya. Dengan kombinasi butir pertama, urbanisasi wilayah yang lebih merata akan lebih cepat terwujud.

Keberhasilan dalam mengarahkan kota-kota menengah dan kecil sebagai tujuan alternatif bagi migrasi sekaligus juga merupakan sumbangan berharga bagi usaha untuk mengendalikan arus migrasi ke kota-kota besar.

Daftar Pustaka

- Firman, T. (1991): **Pengembangan Kota-kota Menengah Dalam Pembangunan Jangka Panjang Ke Dua**. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Nomor 2, April: 8-11.
- Hugo, G.J., T.H. Hull, V.J. Hull and G.W. Jones. (1987): **The Demographic Dimension in Indonesian Development**. Oxford: Oxford University Press.
- Rondinelli, D.A. and K. Ruddle. (1978): **Urbanization and Rural Development: A Spatial Policy for Equitable Growth**. New York: Praeger.
- _____. (1983): **National Secondary Cities in Developing Countries: Policy for Diffusing Urbanization**. Sage: Beverly Hill.
- United Nations Centre for Human Settlements (Habitat). (1985): **The Role of Small and Intermediate Settlements in National Development**. Nairobi.
- Lemba Penelitian Perencanaan Wilayah dan Kota-ITB. 1985. **Urban System and Structure**. Main Report of NUDS Project. Bandung.
- _____. (1991): **Peranan Pusat-pusat Perkembangan Wilayah Dalam Persebaran Penduduk**. Laporan Akhir Penelitian Bersama Kantor Menteri Negara KLH. Bandung.